



Kemendikdasmen

**Reviu Rencana Strategis
Balai GTK Provinsi Riau
Tahun 2025**

A. Capaian Target Renstra

Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2026	
		Target Renstra	Target PK	Realisasi	Target Renstra	Proyeksi Target PK
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan						
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1.54	1.54	2.02	1.7	2.12
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Riau						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Riau minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Riau minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Target pada indikator kinerja kegiatan ini sebesar 1,54 (1.428 Orang), sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 2,02 (1.865 Orang). Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 131,17%, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra), capaian kinerja Tahun 2025 telah memenuhi 89,38% dari target Renstra yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah yang telah direncanakan.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat perubahan pendekatan dalam pengukuran kinerja, dari

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



indikator berbasis output atau volume kegiatan menjadi indikator yang mengukur tingkat keterfasilitasan guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk persentase. Selain itu, terjadi pergeseran fokus kebijakan dan pelaksanaan program. Pada Tahun 2024, kegiatan masih berorientasi pada implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan penguatan melalui Program Guru Penggerak. Sementara itu, pada Tahun 2025 arah kebijakan beralih pada penerapan Pembelajaran Mendalam serta pengembangan kapasitas pendidik melalui Program Bakal Calon Kepala Sekolah sebagai upaya memperkuat kepemimpinan pendidikan di satuan pendidikan.

Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan sekaligus transformasi strategi pelaksanaan program dalam rangka peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

2. IKK 2.1 Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Riau

Target sasaran untuk output ini adalah nilai Sangat Baik dengan rentang nilai **>90**. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan tahun 2025, nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Riau tercatat sebesar 99,88 dengan nilai sangat Baik, atau 110,97%, dengan rincian sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja Anggaran (MONEV KEMENKEU) (50%): 100
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OM-SPAN) (50%): 99,76

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Balai GTK Provinsi Riau mencapai realisasi capaian output lebih dari 100% pada tahun 2025, dengan persentase sebesar 110,97% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra), capaian Tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah dengan presentase sebesar 110,97% (dari nilai ambang batas bawah sebesar 90,01).

Sementara itu, pada tahun 2024 nilai kinerja anggaran juga melampaui target dengan persentase 102,63% dengan nilai Kinerja Anggaran tercatat sebesar 99,39, yang sekaligus merupakan nilai akhir capaian Rencana Strategis (Renstra) periode 2020–2024. Secara komparatif, capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,49 poin nilai pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan konsistensi peningkatan kinerja serta efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

3. IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Riau minimal A

Balai GTK Provinsi Riau berhasil mencapai dan melampaui target SAKIP yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Target sasaran kinerja untuk indikator ini adalah Predikat A dengan rentang nilai >80-90. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Balai GTK Provinsi Riau memperoleh nilai 88,70 atau setara dengan 110,86% dari target tahun 2025, sehingga ditetapkan memperoleh Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A. Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra), capaian Tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah dengan presentase 110,86% (dari nilai ambang batas bawah sebesar 80,01).

Sementara itu, pada tahun 2024 nilai kinerja anggaran juga melampaui target dengan persentase 104,41% dan nilai 84,05, yang sekaligus merupakan nilai akhir capaian Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024. Secara komparatif, capaian SAKIP tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 4,65 poin nilai, yang mencerminkan konsistensi peningkatan kinerja serta penguatan kualitas akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

C. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan data per 30 Januari 2026, realisasi anggaran mencapai **Rp21.235.079.571 (71,78%)** dari total pagu **Rp29.583.398.000**. Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp8.348.318.429** yang di dalamnya termasuk anggaran blokir senilai **Rp8.346.098.000**.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

D. Kendala dan Permasalahan Umum

1. Luasnya Wilayah Layanan dan Keragaman Karakteristik Sasaran

Wilayah layanan Balai GTK Provinsi Riau yang luas dengan karakteristik satuan pendidikan dan guru yang beragam menjadi tantangan dalam pemerataan layanan peningkatan kompetensi. Perbedaan akses, kondisi geografis, dan kesiapan satuan pendidikan memerlukan strategi pelaksanaan yang lebih fleksibel agar kualitas layanan tetap merata dan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Pelatihan dan Pendampingan

Hasil peningkatan kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan belum sepenuhnya diimplementasikan dan disebarluaskan kepada rekan sejawat di satuan pendidikan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya efek pengganda (*multiplier effect*) dari pelaksanaan program peningkatan kompetensi.

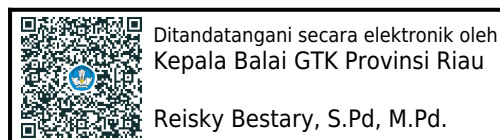
3. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Pendekatan Program

Perubahan kebijakan nasional, termasuk pergeseran fokus program peningkatan kompetensi dan pendekatan pengukuran kinerja, menuntut adanya adaptasi yang cepat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penyesuaian ini memerlukan waktu dan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Bottom of Form

E. Rekomendasi/Langkah Kerja ke Depan

Secara konsisten mengembangkan strategi peningkatan kompetensi yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah dan kebutuhan sasaran melalui pemanfaatan moda daring, pembelajaran bauran (*blended learning*), serta kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan komunitas belajar guna memastikan pemerataan dan kualitas layanan, memastikan penguatan implementasi dan diseminasi hasil program melalui mekanisme tindak lanjut yang terstruktur agar hasil pelatihan dan pendampingan dapat diterapkan secara optimal serta memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan di satuan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia Balai GTK Provinsi Riau agar mampu beradaptasi secara optimal terhadap dinamika kebijakan, pendekatan program, dan sistem pengukuran kinerja melalui pembelajaran berkelanjutan serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Pekanbaru, 30 Januari 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E